



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati Bandung tidak hanya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerja dan kegagalan terhadap program/kegiatan tahun ke 1 RENSTRA yang terdapat pada dokumen anggaran dan pelaksanaan kewenangannya sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Bandung.

Sesuai dengan rencana kerja (RENJA) tahun 2016 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPSTSP tahun 2016-2021 telah ditetapkan indikator sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen penetapan kinerja tahun 2016 ditetapkan 1 sasaran dengan 2 indikator sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Investasi
2. Jumlah ijin yang diterbitkan (42 kewenangan perijinan dan non perijinan)

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung tahun 2016 sebagai berikut:

1. Capaian Nilai Investasi pada tahun 2016 mencapai 122% dari target yang telah ditetapkan tahun 2016
2. Capaian Jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 6.793 dari target yang ditetapkan sebanyak 5.800 ijin yang diterbitkan (melebihi target sebanyak 117%)

Keberhasilan capain kinerja tahun 2016 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi :
 - 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan investasi pemerintah dan dunia usaha.
 - 2) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - 3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia guna peningkatan Pelayanan Investasi
 - 4) Penyelenggaraan pameran investasi.
 - 5) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. meliputi :
 - 1) Penyusunan kebijakan investasi bagi pembagunan fasilitas infrastruktur.
 - 2) Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal.
 - 3) Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.
 - 4) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
3. Program penyampaian potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.
 - 1) Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan juga merupakan keberhasilan dari Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Tahun 2016. Mengingat adanya perubahan terhadap nomenklatur kelembagaan dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Sementara itu, total anggaran untuk mewujudkan kinerja DPMPTSP tahun 2016 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp3.664.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.456.380.869,00.

Berikut disajikan realisasi anggaran tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Program	Kegiatan	Anggaran		Ket
				2016	2016			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi (Rp Trilyun)	Rp Trilyun	6,7	8,2	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha	405.000.000,-	365.576.500,-	DPMPTSP
		Jumlah Ijin yang diterbitkan	Jenis	42 Jenis Perijinan dan non Perijinan (5.800 Izin yang diterbitkan)	42 Jenis Perijinan dan non Perijinan (6.793 Izin yang diterbitkan)		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal.	470.000.000,-	458.444.000,-	
							Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan in-estasi	100.000.000,-	99.997.069,-	
							Penyelenggaraan pameran investasi	1.164.000.000,-	1.062.068.800,-	
						Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan monitoring , evaluasi dan pelaporan	50.000.000,-	22.836.500,-	
							Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	450.000.000,-	433.189.000,-	
							Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	200.000.000,-	196.566.500,-	
							Pengembangan system informasi penanaman modal	200.000.000,-	196.885.000,-	
							Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	320.000.000,-	319.553.500,-	
						Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	305.000.000,-	301.264.000,-	

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah semula Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) yang Mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal sebagaimana pada visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Renstra tahun 2016 s/d 2020.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta Renja sesuai dengan RENSTRA 2016-2020 (Renstra Tahun pertama), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM sampai dengan Tahun 2015/2016.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target, capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan Laporan akuntabilitas Keuangan kepada Pemerintah Daerah (Bupati).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014 adalah sebagai salah satu pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan serta kebijakan-Kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkannya oleh setiap Perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkannya dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi. Sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

3. Kondisi Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan pengembangan dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan dan Peraturan Bupati Bandung No. 64 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan di Kabupaten Bandung yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang meliputi Bidang Perijinan Memulai Usaha, Bidang Perijinan Operasional Usaha, Bidang Penanaman Modal dan Bidang Promosi, Data dan Informasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa kali perubahan Pelimpahan Kewenangan dari Peraturan Bupati dan terakhir telah ditetapkannya Perda Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Bandung no. 28 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Bandung yang semula 20 (dua puluh) kewenangan menjadi 42 (empat puluh dua) kewenangan perijinan.

B. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

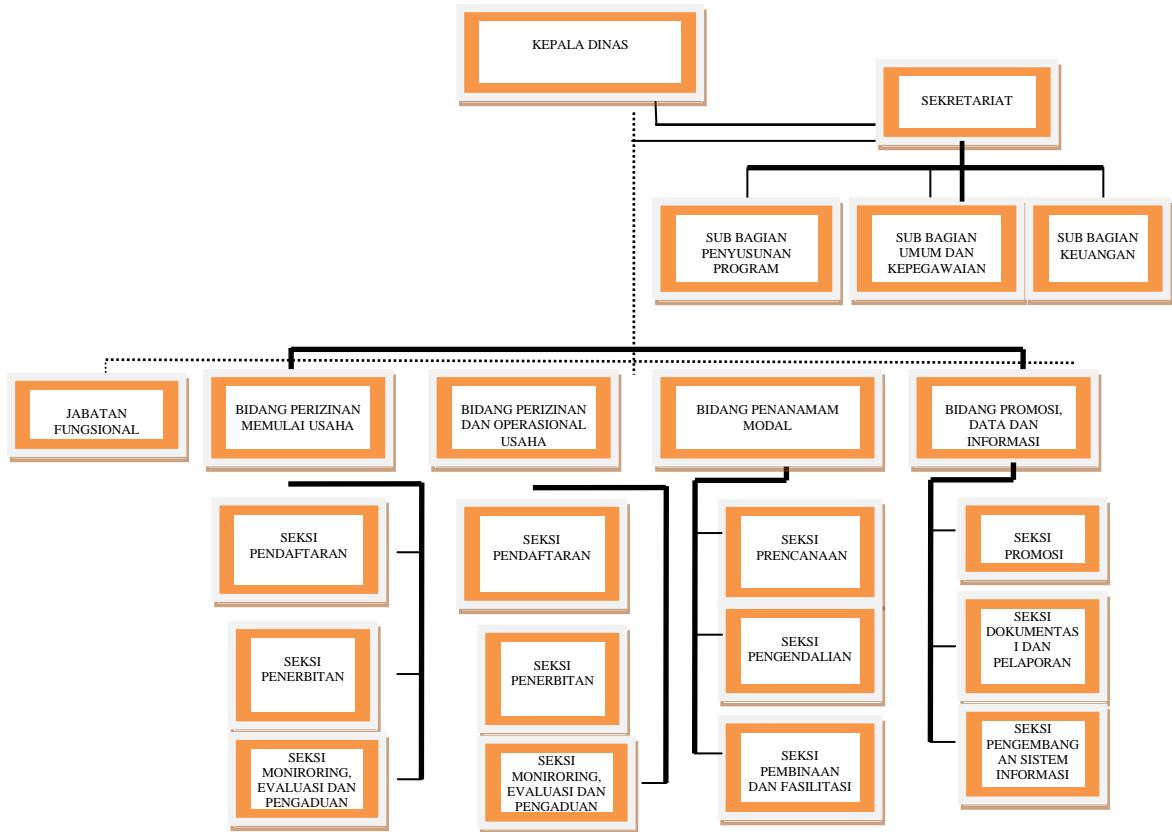
Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP yang meliputi promosi dan pengggalian potensi penanaman modal, pengendalian penanaman modal, perizinan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal yang meliputi Promosi investasi, pengembangan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian penyusunan program;
 - b. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. Sub bagian keuangan.
- 3) Bidang Bidang Perizinan Memulai Usaha, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran;
 - b. Seksi Penerbitan;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pengaduan.
- 4) Bidang Perizinan Operasional Usaha, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran;
 - b. Seksi Penerbitan;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pengaduan.
- 5) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pengendalian;
 - c. Seksi Pembinaan Dan Fasilitasi.
- 6) Bidang Promosi, Data Dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi
 - b. Seksi Data, Dokumentasi Dan Pelaporan
 - c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(Berdasarkan Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah)



Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

1. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin :

Laki-laki : 39 orang
Perempuan : 16 orang

2. Keadaan Pegawai Menurut Eselon:

Eselon II/b : 1 orang
Eselon III/a : 1 orang
Eselon III/b : 4 orang
Eselon IV/a : 15 orang

3. Keadaan Pegawai Menurut Golongan :

Golongan IV : 10 orang
Golongan III : 27 orang
Golongan II : 18 orang

4. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan :

Sarjana (S 2)	: 14 orang
Sarjana (S 1)	: 13 orang
Sarjana Muda	: 3 orang
SLTA	: 24 orang
SLTP	: 1 orang

Ket: (1 orang karyawati dipekerjakan di kabupaten Natuna ikut suami)

C. Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi promosi dan penggalian potensi, pengendalian, perizinan dan melakukan kajian untuk regulasi-regulasi yang berkaitan dengan paket insentif dan kemudahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

D. Permasalahan utama/ Issue Strategic

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Bandung;
2. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini;
3. Proyek-proyek yang di tawarkan / di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah;
4. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP karena kewenangan perlengkapan persyaratan perizinan ada pada PD pemberi rekomendasi;
5. Belum semua investor membuat laporan / LKPM melalui kepala DPMPTSP;
6. Terlalu banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasi;
7. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016 – 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagai PD yang terkait langsung dengan fungsi pelayanan perizinan dan penanaman modal rencana strategis tersebut dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan capaian rencana kerja tahunan (RKT) sehingga adanya sinergitas capaian yang ingin dicapai terhadap program kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu pada Rencana Strategis harus mendukung capaian program yang meliputi izin yang diterbitkan, nilai investasi, dan potensi investasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bandung.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Bandung, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil bupati Bandung lima tahun kedepan 2016-2021 yaitu **“Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”** dengan Misi : 1) Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, 2) Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan, 4) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, 5) Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif, 6) Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup, 7) Meningkatkan Kemandirian Desa, 8) Meningkatkan reformasi birokrasi, dan 9) Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Menyelaraskan Visi Misi Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Misi 5(Lima) yaitu **“Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif”** pada sektor Investasi dan modal. Misi menciptakan

pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan **“Perekonomian yang Berdaya Saing”**. Dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan Daerah dengan sasaran meningkatkan kemudahan investasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Bandung merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut:

- Pengembangan sistem Informasi Investasi
- Perumusan kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
- Peningkatan Pelayanan Perijinan pada PTSP
- Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- Peningkatkan Kapasitas Aparatur (SDM)

Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

- a. Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bandung;
- b. Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung;
- c. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;
- d. Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor;
- e. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
- f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung;
- b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;
- c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- d. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan guna melayani para calon investor dan pembuat izin;

- e. Meningkatkan layanan perijinan melalui PPTSP.

Strategi :

- a. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi;
- b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal;
- c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- d. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kebijakan :

- a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya;
- b. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi;
- c. Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perijinan bagi investor;
- d. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi;
- e. Merumuskan sistem kerjasama investasi;
- f. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan;
- g. Merumuskan sistem promosi invstasi, baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
- h. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Dan Perijinan
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perijinan;
- j. merumuskan sistem peningkatan profsionalisme Sumber Daya Aparatur.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016.

Penetapan kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2016.

Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah, penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelola program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2016 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, dokumen rencana strategis DPMPTSP tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Tahun 2016 dan DPA DPMPTSP Tahun 2016. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 :

Tabel 2.I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Investasi	1. Nilai Investasi 2. Jumlah Ijin yang diterbitkan	Rp6.700Milyar 42 kewenangan perijinan dan non perijinan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp2.189.000.000,-	APBD Kab. Bandung
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp1.170.000.000,-	APBD Kab. Bandung
3	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Rp305.000.000,-	APBD Kab. Bandung

Sesuai dengan perjanjian kinerja, anggaran untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut sebesar Rp3.664.000.000,- yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas/utama.

Selain itu, diluar perjanjian kinerja yang telah ditetapkan terdapat anggaran untuk membiayai program/kegiatan administrasi umum sebagai pendukung pencapaian target kinerja. Adapun jumlah anggaran tersebut sebesar Rp2.299.200.000,-.

Dalam rangka meningkatkan kualitas LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, Tim melakukan Kajian/review Internal. Berikut tujuan sasaran dan indikator sasaran hasil kajian/Review

Tabel sandingan sebelum dan sesudah rivew (Tujuan,Sasaran, Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Utama)

Sebelum Review				Setelah Review			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU
Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bandung;	Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung		Jumlah perangkat pendukung basis data investasi penanaman modal dan perijinan	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bandung	✓ Meningkatkan Investasi ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan	✓ Nilai Investasi ✓ Persentase ketepatan waktu penerbitan dok. perijinan	✓ Nilai Investasi ✓ Persentase ketepatan waktu penerbitan dok. Perijinan

Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung;	Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;			Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Bandung	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai SAKIP ✓ Persentase BMD Dalam keadaan Baik ✓ Nilai Rata-rata SKP
Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;	Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;		Jumlah peserta pelatihan/ bintek dalam meningkatkan SDM				
Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor;	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan guna melayani para calon investor dan pembuat		Jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kemudahan berinvestasi di Kabupaten Bandung				

	izin;						
Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;	Meningkatnya layanan perijinan melalui PPTSP.		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun				
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan.							

**SANDINGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SETELAH REVIEW INTERNAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SEBELUM REVIEW				SETELAH REVIEW			
No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4				
1	Meningkatnya Investasi	1.Nilai Investasi 2.Jumlah Ijin yang diterbitkan	Rp6.700Milyar 42 kewenangan perijinan dan non perijinan	1	Meningkatnya Investasi	1. Nilai Investasi 2.Persentase ketepatan waktu penerbitan dok. Perijinan	1. Rp7,2 Trilyun 2. 80%
				2	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP 2. Prsentase BMD dalam Kondisi Baik 3. Nilai Rata-rata SKP	1. 60,50 2. 85% 3. 85

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam tahun anggaran 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menetapkan 1 (Satu) sasaran yang akan dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 2 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi	Tahun 2016		
		2015	Target	Realisasi	%Capaian
1	Nilai Investasi (Rp Trilyun)	140,5%	Rp6.7.000.000.000.000,00	Rp8.175.002.462.846,00	122
2	Jumlah Ijin yang diterbitkan	106%	5.800 ijin yang terbit(dari 42 jenis Perijinan)	6.793 ijin yang terbit (dari 42 jenis Perijinan)	117
Rata-rata Capaian Kinerja					119,56

A.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Tabel 3.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Program	Kegiatan	Anggaran		Perangkat Daerah
				2016	2016			Target (Rp)	Realisasi (RP)	
1	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi (Rp Trilyun)	Rp Trilyun	6,7	8,2	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha	405.000.000,-	365.576.500,-	DPMPTSP
		Jumlah Ijin yang diterbitkan	Jenis	42 Jenis Perijinan dan non Perijinan (5.800 Izin yang diterbitkan)	42 Jenis Perijinan dan non Perijinan (6.793 Izin yang diterbitkan)		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal.	470.000.000,-	458.444.000,-	
							Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	100.000.000,-	99.997.069,-	
							Penyelenggaraan pameran investasi	1.164.000.000,-	1.062.068.800,-	
						Peningkatan Promosi dan Kerjasama	Peningkatan monitoring , evaluasi dan	50.000.000,-	22.836.500,-	

						Investasi	pelaporan			
							Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	450.000.000,-	433.189.000,-	
							Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	200.000.000,-	196.566.500,-	
							Pengembangan system informasi penanaman modal	200.000.000,-	196.885.000,-	
							Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	320.000.000,-	319.553.500,-	
						Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	305.000.000,-	301.264.000,-	

Penjelasan

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Meningkatnya Investasi dan Indikator kinerja pertama yaitu Nilai Investasi. pada tahun 2016 dengan target sebesar Rp6.7,00 Trilyun. Melalui 3 Program dan 10 kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu nilai realisasi investasi pada tahun 2016 Rp8.175.002.462.846,-. Sedangkan indikator kedua yaitu Jumlah Ijin yang diterbitkan yaitu 42 jenis perijinan dan non perijinan dengan target (5.800 ijin yang diterbitkan) Realisasi kinerja pada indikator ini yaitu sebanyak (6.793 Ijin yang diterbitkan). Walaupun pada tahun 2016 nilai realisasi Investasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan pemerintah daerah, dengan upaya secara terus menerus menyederhanakan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khususnya di Kabupaten Bandung. Selain itu, kepatuhan para pelaku Usaha/Investor dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya harus terus ditingkatkan agar upaya pemantauan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan secara efektif. Upaya lainya dari Pemerintah maupun pemerintah daerah adalah membenahi dan meningkatkan kondisi insfrastruktur sehingga dapat meyakinkan para penanaman modal yang berminat melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Bandung.

A.2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015, Tahun 2016 dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Penyajian laporan Kinerja tahun 2016 merupakan tahun pertama dari Renstra/ RPJMD tahun 2016-2021 dan merupakan akhir periode RPJMD tahun 2010-2015 yang merupakan masa transisi atau incumben Bupati Bandung maka sampaikan perbandingan capaian kinerja tahun 2015 (akhir tahun periode RPJMD sebagai Capaian awal Renstra/RPJMD Tahun 2016-2021)

Tabel 3.II

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	% capaian
Nilai Investasi (Rp Trilyun)	Rp9.418.387.120.817,00	Rp8.175.002.462.846,00	-15,21
Jumlah Ijin yang diterbitkan	6.122 ijin yang terbit	6.793 ijin yang terbit	9,87

Penjelasan

1. Nilai Investasi

Nilai Realisasi Investasi pada Tahun 2016 sebesar Rp8.175.002.462.846,00 turun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar Rp9.418.387.120.817,00(15,21%). Perkembangan realisasi investasi berdasarkan LKPM dan Izin Usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang. Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan Iklim Investasi di Kabupaten Bandung cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan pemerintah daerah, dengan upaya secara terus menerus menyederhanakan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khususnya di Kabupaten Bandung.

2. Jumlah Ijin yang diterbitkan

Untuk tahun 2016 dari (42 jenis perijinan dan non perijinan) Jumlah izin yang terbit yaitu sebanyak 6.793 sedangkan pada tahun 2015 jumlah izin yang terbit sebanyak 6.122 ini menunjukkan ada kenaikan sebesar 9,87% dari capaian tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP telah mengarah kepada pelayanan perizinan yang optimal dimana para aparatur DPMPTSP berusaha untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP perizinan yang ada.

A.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

Selanjutnya, terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 dan target akhir renstra DPMPTSP. Pada tahun pertama target capaian nilai investasi sebesar 7trilyun namun seiring dengan pelaksanaan target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 diturunkan menjadi Rp6,7Trilyun (sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati) mengingat hasil analisa realisasi capaian tahun sebelumnya yang mengalami pluktuatif. disajikan dalam tabel di bawah ini :

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dan target jangka menengah

Tabel 3.III

Indikator Kinerja	Realisasi sampai tahun 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target Akhir Renstra PD
Nilai Investasi (Rp Trilyun)	Rp8.175.002.462.846,00	7,2 Trilyun	7,5Trilyun	7,8 Trilyun	8 Trilyun	37,5 Trilyun
Jumlah Ijin yang diterbitkan	6.793 ijin yang terbit	5.800	5.850	5.900	5.950	29.300 Ijin yang diterbitkan

Penjelasan

1. Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari RENSTRA DPMPTSP 2016-2021. Capaian kinerja dari indikator sasaran yaitu nilai investasi pada tahun pertama ini (2016) baru terealisasi sebesar Rp8,2 trilyun sedangkan target akhir RENSTRA 2016-2021 yaitu Rp37,5 trilyun. Berarti capaian kinerja pada tahun pertama baru tercapai 22% melebihi 2% dari target tahunan. Diharapkan seiring dengan berbagai usaha pemerintah daerah dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung tahun berjalan akan mengalami peningkatan Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Bandung sehingga di akhir tahun target RENSTRA DPMPTSP dapat tercapai.
2. Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja pada indikator ini adalah jumlah ijin yang diterbitkan sampai tahun 2016 (tahun pertama RENSTRA) yaitu sebanyak 6.793 ijin yang terbit sedangkan target RENSTRA 2016-2021 Sebanyak 29.300 Ijin yang diterbitkan berarti capaian kinerja pada tahun 2016 telah tercapai sebesar 23,18% dari target akhir RENSTRA 2016-2021.

A.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan Standar Nasional

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung bahwa Indikator SPM dan target SPM tahun 2014 sebagai berikut :

SPM Nasional
Tabel 3.IV

No	Jenis Pelayanan/Indikator SPM	Target
1	Kebijakan penanaman modal Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Bidang Usaha
2	Kerjasama penanaman modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	1 Kali
3	Promosi penanaman modal Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 kali
4	Pelayanan penanaman modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/Kota.	100%
5	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 Kali
6	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%
7	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali

Dari 7 indikator SPM tersebut di atas, walaupun tidak menjadi indikator kinerja secara langsung, akan tetapi indikator tersebut setiap tahunnya selalu dilaksanakan oleh DPMPSTSP. Hal tersebut terlihat dari program/kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan SPM Nasional dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.V

No	Jenis Pelayanan/Indikator SPM	Target Nasional Tahun 2014	Realisasi Tahun 2016
1	Kebijakan penanaman modal Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Bidang Usaha	3 informasi Peluang Investasi
2	Kerjasama penanaman modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	1 Kali	2 Kali
3	Promosi penanaman modal Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 kali	6 Kali
4	Pelayanan penanaman modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/Kota.	100%	100%
5	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 Kali	2 Kali
6	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	100%

7	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali	1 Kali
---	--	--------	--------

Penjelasan

1. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2016 sebanyak 3 informasi Peluang Investasi yang dapat diinformasikan kepada masyarakat berarti telah melebihi target Nasional sebanyak 300% dari target Nasional 1 jenis bidang usaha.
2. Jumlah Kerjasama penanaman modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
Jumlah Kerjasama penanaman modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada tahun 2016 dilaksanakan 1 kali mencapai 100% dari target Nasional yang telah ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 kali.
3. Promosi penanaman modal Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota
Indikator Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 6 kali, berarti mencapai 600% dari target Nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 kali. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah melalui kegiatan pameran yang dilaksanakan secara Nasional maupun lokal dan promosi peluang investasi ke luar Negeri melalui kegiatan temu bisnis.
4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebanyak 6 perizinan (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai

kewenangan pemerintah kabupaten/Kota), mencapai 83,33% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 100%. 1 perizinan yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dilaksanakan karena berdasarkan dengan Perka BKPMRI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPMRI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ditiadakan.

5. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha

Indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk 100 perusahaan, mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 kali. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja nilai investasi. Adapun bentuk kegiatannya dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi.

6. Terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Indikator terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada tahun 2016 tercapai 100%. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah ijin yang diterbitkan. karena melalui kegiatan ini para pengusaha mampu mendapatkan informasi secara optimal terkait Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi di Kabupaten Bandung.

7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

Indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk 80 Pelaku usaha, mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 kali. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja nilai investasi. Adapun bentuk kegiatannya dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.

A. 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja DPMPTSP tahun 2016, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja DPMPTSP tahun 2016 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, walaupun melampaui target yang telah ditetapkan, terdapat indikator kinerja yang capaiannya turun dari tahun sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja DPMPTSP tahun 2016 adalah:

1. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi
2. Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Bandung
3. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bandung
4. Adanya kesadaran para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM
5. Promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif melalui berbagai media
6. Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tahun 2016 adalah:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Bandung.
2. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
3. Proyek-proyek yang di tawarkan / di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah.
4. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi
5. Dukungan anggaran pada program dan kegiatan DPMPTSP tahun 2016 Belum optimal sesuai dengan kebutuhan anggaran ideal
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Adapun alternatif solusi untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja tahun 2016 adalah:

1. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
2. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.
3. Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor
4. Melakukan sosialisasi melalui aparat kewilayahan beserta masyarakat
5. Optimalisasi dukungan anggaran pada setiap program dan kegiatan
6. Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan

A.6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan per unit yang lebih kecil dari target.

Tabel 3.VI

No	Program	Kegiatan	Input		Output		Unit Cost Output		Hasil Perhitungan	Indikasi
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	405.000.000,-	365.576.500,-	1	2	405.000.000,-	365.576.500,-	90,27	efisien
		2. Kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	470.000.000,-	458.444.000,-	100	100	470.000.000,-	458.444.000,-	100	efisien
		3. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan pelayanan investasi	100.000.000,-	99.997.069,-	1	1	100.000.000,-	99.997.069,-	100	efisien
		4. Kegiatan penyelenggaraan pameran	1.164.000.000,-	1.062.068.800,-	5	6	1.164.000.000,-	1.062.068.800,-	110	Efisien

		investasi								
		5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,-	22.836.500,-	2	2	50.000.000,-	22.836.500,-	219	efisien
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Kegiatan penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	450.000.000,-	433.189.000,-	3	3	450.000.000,-	433.189.000,-	104	efisien
		2. Kegiatan penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	200.000.000,-	196.566.500,-	1	1	200.000.000,-	196.566.500,-	102	efisien
		3. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	200.000.000,-	196.885.000,-	1	1	200.000.000,-	196.885.000,-	102	efisien
		4. Kegiatan penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	320.000.000,-	319.553.500,-	1	1	320.000.000,-	319.553.500,-	101	efisien
3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	1. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	305.000.000,-	301.264.000,-	3	3	305.000.000,-	301.264.000,-	101	efisien

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi di atas, diperoleh informasi bahwa sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi menunjukkan efisiensi.

A.7. Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat 3 program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016 yang menunjang langsung terhadap pencapaian kinerja. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja
Tabel 3.VII

No	Indikator kinerja	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
1	Nilai Investasi	<p>1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha ➤ Kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal ➤ Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan pelayanan investasi ➤ Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi ➤ Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan <p>2. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
2	Jumlah Ijin yang diterbitkan	<p>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur ➤ Kegiatan penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal ➤ Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Kegiatan penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

B. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja DPMPSTSP tahun 2016 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar **Rp3.664.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp3.456.380.869,00** atau **94,33%**. Adapun rencian realisasi anggaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.VIII

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.189.000.000,-	2.008.922.869,-	91.77	180.077.131,-
	1. Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	405.000.000,-	365.576.500,-	90.27	39.423.500,-
	2. Kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	470.000.000,-	458.444.000,-	97.54	11.556.000,-
	3. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan pelayanan investasi	100.000.000,-	99.997.069,-	100.00	2.931,-
	4. Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi	1.164.000.000,-	1.062.068.800,-	91.24	101.931.200,-
	5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,-	22.836.500,-	45.67	27.163.500,-

2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.170.000.000,-	1.146.194.000,-	97.97	23.806.000,-
	1. Kegiatan penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	450.000.000,-	433.189.000,-	36.26	16.811.000,-
	2. Kegiatan penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	200.000.000,-	196.566.500,-	98.28	3.433.500,-
	3. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	200.000.000,-	196.885.000,-	98.44	3.115.000,-
	4. Kegiatan penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	320.000.000,-	319.553.500,-	99.86	446.500
3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	305.000.000,-	301.264.000,-	98.78	3.736.000,-
	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	305.000.000,-	301.264.000,-	98.78	3.736.000,-
	Jumlah	3.664.000.000,-	3.456.380.869,-	94.33	293.837.211,-

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kabupaten Bandung tahun 2016, dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang tersurat dalam perjanjian kinerja tahun 2016 yaitu meningkatnya nilai investasi dengan dua indikator kinerja yaitu nilai investasi dan jumlah ijin yang diterbitkan dapat dinyatakan telah melampaui target sasaran yaitu indikator kinerja nilai investasi yang ditargetkan sebesar Rp6,7trilyun tercapai sebesar 8,2trilyun walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2015). Sedangkan target dari indikator kinerja jumlah ijin yang diterbitkan (dari 42 jenis perijinan dan non perijinan) sebanyak 5.800 ijin yang diterbitkan tercapai sebanyak 6.793 ijin yang diterbitkan.

Selanjutnya kaitan dengan target pencapaian RENSTRA DPMPTSP 2016-2021 tahun pertama kedua indikator kinerja diatas telah melebihi target capaian sebesar 2% untuk nilai investasi dan 8,33% untuk jumlah ijin yang diterbitkan.

Kemudian Berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan tahun 2016 terhadap target realisasi kinerja dan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari program kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasi dari hasil kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kinerja kegiatan pada belanja PD dengan capaian kinerja 100%
2. Pada belanja langsung program realisasi capaian kegiatan kinerja 100% dan realisasi keuangan 95,07%
3. Hambatan dan permasalahan :
 - a. Program kegiatan untuk belanja kegiatan pada belanja program belum sesuai dengan usulan pada saat perencanaan awal sehingga target kegiatan program menyesuaikan pada anggaran yang tersedia pada akhir tahun anggaran.
 - b. Belum semua pengusaha menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PMA/PMDN. Hal ini mengakibatkan perkembangan realisasi investasi belum diketahui secara pasti serta berpengaruh terhadap pembinaan yang harus dilakukan kepada investor PMA/PMDN.
 - c. Terhadap perkembangan investasi Kabupaten Bandung data yang disampaikan baru berdasarkan terhadap izin yang diterbitkan, sehingga belum memncerminkan data investasi secara keseluruhan.

4. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Bandung.
5. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
6. Proyek-proyek yang ditawarkan/dikerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah.
7. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP karena kewenangan perlengkapan persyaratan perizinan ada pada PD pemberi rekomendasi.
8. Terlalu banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasi.
9. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

2. Langkah Kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2016 s.d 2021.
2. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah (DPMPTSP) khususnya terhadap program pusat dan daerah dengan pengusaha PMA/PMDN yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Bandung.
3. Mengusulkan dan mengkoordinasikan tentang potensi investasi dan nilai investasi kepada PD terkait penerbitan izin yang menjadi kewenangan PD sehingga adanya pembanding terhadap nilai investasi berdasarkan izin yang dikeluarkan DPMPTSP dan nilai investasi yang dikelola oleh masing-masing PD. Demikian juga terhadap nilai investasi terhadap izin yang dikeluarkan oleh tingkat kecamatan.
4. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu kepada tahapan pelaksanaan Renstra tahun 2016.

5. Meningkatkan pemantauan pembinaan pengawasan terhadap PMA/PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bandung.
6. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.
7. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
8. Melakukan koordinasi kepada PD pengolah rekomendasi untuk mempedomani SOP PTSP dalam memproses rekomendasi.
9. Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor.
10. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi
11. Mengingat adanya perubahan terhadap nomenklatur kelembagaan dari Badan Penanaman Modal dan Pijinan (BPMP) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) maka capaian kinerja akan lebih di teknis termasuk adanya program kewilayahan.

Soreang, Februari 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG**

Drs. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.IPol

Pembina Utama Muda

NIP.196960124.198903.1.001